

DEKOLONIALISASI DEMOKRASI DARI PESANTREN SUKOREJO

Muhammad Risqil Azizi

Alumni Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy & Ma'had Aliy
Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo
muhammadrizqilazizi@yahoo.co.id

Abstract

The issue raised in this paper is about the fenomena of harmony both NU, MD and LDII communities di Awar-Awar Village Asembagus Situbondo Regency. By used ethnography approach founded that harmony constructed in a social manner by NU, MD and LDII communities and elites of Awar-awar village in every day life. Social construction consists of three moments that is externalization of religious understanding social institution, objectivation through interaction both people by social institution, and internalization is self identification by socialization. In a social manner, because of it paternalistic character made elites construction influence to people construction. In a social manner, "*pendalungan*" (*Hybrid culture between Java and Madura ethnic*) characteristic also give cultural frame to creating harmony. The harmony condition influence all live aspects of people either in a social manner or economy and culture.

Keywords: *Dekolonialisasi, Demokrasi, dan Pesantren*

Pendahuluan

Menurut Zamakhsyari Dhafier, unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Unsur kiai ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena kiai dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning merangkap pemimpin pada acara-acara ritual keagamaan, seperti melakukan shalat berjamaah, *istighatsah*, pengajian, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur-unsur lainnya bersifat subsider dan berada di bawah pengawasan kiai.¹

¹ Lihat Zamakhsyari Dhafier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2001), 93.

Ini menunjukkan bahwa kiai merupakan tokoh sentral dalam masyarakat pesantren.

Ketokohan kiai merupakan ciri khas dalam masyarakat pesantren. Hal ini terjadi karena kultur masyarakat Indonesia yang paternalistik. Meskipun demikian, individu kiai sendiri merupakan gelar yang tercipta melalui proses teologis. Penyetaraan gelar kiai terhadap seseorang bukan seperti pemberian gelar akademik atau gelar kehormatan, namun berdasarkan keistimewaan pribadinya yang dalam perspektif agama pribadi tersebut memiliki sifat *warasatul anbiyah*' (pewaris nabi) seperti kedalaman ilmu agama, amanah, *wira'i, zuhud, tawadblu*', dan sebagainya.² Keistimewaan ini menempatkan kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi di pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fid din*).

Berbicara soal otoritas kepemimpinan kiai di pesantren, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa kepemimpinan kiai di pesantren memiliki watak kharismatik.³ Pendapat ini cukup argumentatif mengingat bahwa pesantren biasanya didirikan oleh seseorang yang bercita-cita tinggi dan mampu menampilkan seorang pemimpin yang tertempat oleh pengalaman, memiliki keunggulan kepribadian yang dapat mengalahkan pribadi-pribadi lain di sekitarnya. Kekuatan pribadi seperti ini menimbulkan corak kepemimpinan yang sangat pribadi sifatnya, yang berlandaskan penerimaan masyarakat luar dan warga pesantrennya secara mutlak. Sifat mutlak dan pribadi dari kepemimpinan seperti inilah yang dinamai kharisma.

Kepemimpinan dengan watak kharismatik ini bukan tanpa cacat. Abdurrahman Wahid menegaskan, kepemimpinan tersebut di antaranya menimbulkan watak ketidakpastian dalam perkembangan pesantren yang bersangkutan karena semua hal bergantung pada keputusan pribadi sang pemimpin.⁴ Kebergantungan ini bisa jadi disebabkan anggapan berlebihan masyarakat pesantren terhadap Kiai. Pesona kharisma sang kiai seringkali menyilaukan mata para santri sehingga mereka memposisikan kiai ber-

² Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005), 65.

³ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001), 180.

⁴ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, 181.

ada ‘di atas segala-galanya’ bahkan sebagai ‘kakek segala tahu’. Para santri akan tunduk patuh pada kiainya tanpa syarat. Bagaimanapun masalahnya, mereka akan mengikuti persoalan-persoalan yang terjadi di pesantren tidak diselesaikan melalui dialog yang melibatkan kiai dan santri. Semua bergantung pada kiai. Kiai-lah ambang batas penentu kebijakan bagi masyarakat pesantren. Toh, meskipun terjadi dialog antara kiai dan santri, itu hanya terjadi dalam kancah intelektual-keagamaan yang dibungkus dalam seremoni *bahtsul masa’il* dengan tetap memposisikan kiai sebagai pemutus perkara. Sedangkan menyangkut persoalan pengembangan pesantren dan problematikanya, kiai lah yang menjadi rujukan inti utama. Semua bergantung pada kebijakan kiai. Banyak sekali program pengembangan yang tiba-tiba berhenti karena ketika disampaikan kepada kiai, seringkali kiai tidak menyetujuinya. Bahkan, santri tidak merasa perlu untuk turut campur dalam persoalan pesantren. Semua urusan kepesantrenan diserahkan sepenuhnya kepada kiai.

Sisi kewibawaan atau karisma yang dimiliki kiai juga berperan dalam memberikan jarak secara fisik antara kiai dan santri. Interaksi fisik antara kiai dan santri biasanya hanya terjadi ketika pengajian dengan kiai sebagai *mu’allimnya*. Sistem pembelajaran tradisional di pesantren yang biasa disebut *bandongan* atau *sorogan* tidak memberikan ruang dialog antara kiai dan santri. Budaya ‘santri mengacungkan jari’ apalagi berdebat dengan kiai sangatlah tabu bagi kalangan pesantren. Jika demikian, ruang-ruang untuk kebebasan berpendapat dan menuangkan pemikiran dan gagasan—yang merupakan nilai ulama demokrasi—amat sempit dan tidak berkembang di pesantren.

Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo, atau yang lebih dikenal dengan pesantren Sukorejo adalah salah satu pesantren besar di Indonesia. Santri-santrinya berjumlah puluhan ribu berasal dari seluruh penjuru nusantara. Usianya kini telah mencapai satu abad. Pesantren yang terlelak di ujung timur pulau Jawa ini telah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang. Pendidikan yang diselenggarakan di pesantren ini tidak hanya pendidikan agama saja, melainkan juga menyediakan pendidikan umum mulai jenjang dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Pesantren mulai dirintis oleh KHR. Syamsul Arifin pada tahun 1908 M ini telah memadukan tradisi salaf dan perkembangan modern. Manajemen pesantren Sukorejo juga sudah sangat maju. Struktur kepengurusan pesantren telah tertata rapi dengan pembagian

tugas yang jelas. Boleh dibbilang, dari sisi manajerial pesantren Sukorejo sudah sangat maju.

Tidak seperti kebanyakan pesantren tradisional, pesantren ini dipimpin secara kolektif-kolegial. Itu artinya, pengasuh pesantren tidak menjadi penguasa tunggal, melainkan terdapat ketua yayasan yang juga memegang otoritas struktural di pesantren. Dalam perkembangannya, pesantren Sukorejo telah memadukan antara kendali kultural dan dan kendali struktural.

Namun demikian, pesantren Sukorejo masih tidak bisa lepas dari watak kepemimpinan kharismatik kiainya. Kharisma tersebut—meminjam bahasa Weber—dirutinkan dari generasi ke generasi kepemimpinan pesantren Sukorejo. Setelah KHR. Syamsul Arifin wafat, digantikan oleh putranya, KHR. As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad adalah tokoh nasional yang memiliki pesan penting bagi berdirinya organisasi islam terbesar, Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad adalah kiai karismatik yang disegani oleh masyarakat, kalangan kiai, hingga penguasa. Karisma tersebut turun kepada putranya, KHR. Achmad Favvaid As'ad yang memang sejak awal oleh kiai As'ad disiapkan sebagai penggantinya ketika wafat. Dan kini, tampuk kepemimpinan pesantren jatuh di tangan KHR. Achmad Azaim Ibrahimy, cucu dari Kiai As'ad.

Menyimak kesimpulan Weber, biasanya proses kepemimpinan karismatik hampir mendekati sifat otoriter, yakni kurang mengandalkan unsur musyawarah, dialog, rasional dan legal formal, sekalipun boleh jadi sang pemimpin memiliki jiwa demokratis.⁵ Kepemimpinan semacam ini tentu tidak ideal dan menimbulkan kerugian, termasuk bagi masyarakat pesantren.

Namun, pada kenyataannya perubahan dan penyesuaian terjadi di pesantren Sukorejo. ini membuktikan bahwa kiai mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. ini menandakan pula bahwa pesantren dapat melakukan pembaruan, baik pada sistem pendidikan pesantren, pemahaman keagamaan, termasuk bidang-bidang sosial, serta mencari pola-pola baru dalam kepemimpinan pesantren.⁶ Pola kepemimpinan yang dibalut oleh nilai-nilai tradisional ditambah ramuan perkembangan modern berdialektika di pesantren Sukorejo.

⁵ Sukanto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3S, 1999), 28.

⁶ *Ibid.*, 17.

Yang menarik untuk dikaji adalah, bagaimana nilai-nilai demokrasi mengejawantah di pesantren Sukorejo? Tulisan ini akan mencoba menjabarkan secara gamblang mengenai pergulatan nilai-nilai tradisional dan modernitas yang terjadi di pesantren Sukorejo. Tulisan ini akan memberikan jawaban dari persoalan sejauh manakah pesantren mampu melestarikan nilai tradisional yang baik dan mengambil produk perkembangan modern yang lebih baik (*al-muhafazhah 'ala al-qadim as-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah*) sebagaimana yang dijunjung tinggi selama ini.

Musyawah sebagai Inspirasi Nilai-Nilai Demokrasi

Menurut Kuntowijoyo, berbicara mengenai nilai-nilai demokrasi dalam islam tidak lepas dari konsep musyawarah. Akar dari demokrasi dalam islam tercermin dalam praktik musyawarah.⁷ Kata musyawarah terambil dari akar kata *sy-, w-, r-*, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Musyawarah dapat juga berarti mengatakan atau mengajukan sesuatu. Kata musyawarah pada dasarnya digunakan untuk hal-hal baik, sejalan dengan makna dasarnya.⁸ Maka dari itu, Raghib al-Ashfihani—sebagaimana dikutip oleh al-Alusi—memaknai musyawarah sebagai saling mengajukan pendapat satu sama lain untuk memperoleh keputusan.⁹

Dalam al-Qur'an, penjelasan mengenai musyawarah tertera sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ^ط
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terha-

⁷ A. Syafi'i Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, (Bandung : Mizan, 2009), 159.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet. 2, 2007), 617.

⁹ Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran wa as-Sab'i al-Matsani*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 318.

dap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Salah satu ajaran yang dapat diambil dalam ayat tersebut adalah perintah untuk melakukan musyawarah. Konteks perintah dalam ayat di atas memang tertuju kepada Nabi Muhammad saw. Akan tetapi, perintah itu juga menyeluruh bagi umat muslim.

Mengapa Nabi dianjurkan musyawarah? Fakhruddin ar-Razi, memberikan penjelasan mengenai manfaat dianjurkannya Rasul untuk bermusyawarah yaitu: *Pertama*, secara emosional, musyawarah menambah kecintaan dan kedekatan para sahabat dengan nabi. ini membuktikan, bahwa musyawarah memiliki fungsi untuk merekatkan solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. persoalan-persoalan dibicarakan bersama-sama untuk mencapai hasil yang terbaik. Kolektivitas yang merupakan proses dalam musyawarah melahirkan solidaritas yang kuat bagi masyarakat. *Kedua*, meskipun Nabi adalah orang yang paling sempurna secara intelektualitas, bukan berarti pengetahuan Nabi tidak terbatas karena Nabi tetaplah manusia biasa. Boleh jadi, sisi kemaslahatan suatu persoalan diketahui oleh pihak lain. Maka dari itu, persoalan-persoalan yang muncul harus dihadapi secara kolektif. Persoalan yang dimaksud di sini tentu bukanlah persoalan agama, melainkan persoalan duniawi. *Ketiga*, dengan bermusyawarah, setiap pihak yang terlibat akan berusaha untuk memikirkan yang terbaik bagi persoalan yang dimusyawarahkan.”¹⁰ Maka tak heran, Nabi dalam sebuah kesempatan bersabda,

ماتشاور قوم قط إلا هودوا لأرشد أمرهم

“Tidaklah bermusyawarah suatu masyarakat kecuali mereka diberi petunjuk bagi paling baiknya persoalan.”¹¹

Faktanya, Nabi memang sering meminta dan menerima pendapat para

¹⁰ Muhammad ar-Razi, *Tafsir Mafatih al-Ghaib*, jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 68.

¹¹ *Ibid*, 68.

sahabatnya. Para sahabat bebas mengajukan pendapat kepada Nabi dan Nabi juga tidak sungkan menerima pendapat mereka. Di antaranya, untuk menentukan posisi markas kaum muslimin saat perang Badar, Nabi menerima pendapat cemerlang Khubab bin Mundzir. Ketika nabi mendengar gosip tak sedap mengenai istri tercintanya, Aisyah ra., Nabi secara terbuka meminta pendapat beberapa sahabatnya mengenai persoalan tersebut.¹² Tak heran, Al-Qurthubi sampai memberikan pernyataan bahwa Nabi adalah orang yang paling banyak melakukan musyawarah.¹³ ini berarti bahwa Nabi menginginkan agar umatnya benar-benar meneladani beliau. Nabi tentu menginginkan agar tradisi musyawarah dalam memecahkan persoalan ini hendaknya menjadi identitas bagi kaum muslimin. Lebih jauh, al-Qur'an menyatakan,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Dalam ayat tersebut, musyawarah disandingkan dengan kewajiban agama yang prinsip yaitu shalat dan zakat. Hal ini menandakan bahwa musyawarah adalah salah satu bagian prinsip yang mesti dipegang teguh oleh masyarakat muslim. Dalam ayat tersebut, Allah memberikan apresiasi kepada masyarakat atau komunitas yang melakukan musyawarah dalam persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda,

ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد

“Tidak akan rugi siapapun yang beristikharah, tidak akan menyesal siapapun yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin mereka yang ber-

¹² Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 159 dan 205.

¹³ Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, jilid 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 36.

usaha (mencari nafkah untuk keluarganya)”¹⁴

Apa yang dapat dipahami dari pembahasan di atas adalah, bahwa di dalam musyawarah terdapat kebebasan mengemukakan pendapat (*al-hurriyyah*), kolektifitas dalam menyelesaikan persoalan, persamaan (*al-musawah*), dan keterbukaan. Kesemuanya merupakan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh islam yang mestinya menjadi inspirasi masyarakat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencerminkan kehidupan demokratis masyarakat muslim. Pesantren, tempat dimana nilai-nilai luhur islam dibumikan dalam kehidupan masyarakat tentu sangat memahami nilai-nilai universal tersebut. Persoalannya, bagaimana nilai-nilai universal itu diejawantahkan di tengah kehidupan masyarakat pesantren secara partikular, perlu ditelusuri lebih jauh sehingga dapat diketahui gambaran kongkrit pengejawantahan nilai-nilai itu dalam gaya khas pesantren.

Tradisi Dialog di Pesantren Sukorejo

Pesantren Sukorejo memiliki tradisi yang khas dalam menyelesaikan persoalan, yaitu dengan melakukan dialog (musyawarah). Dialog di pesantren Sukorejo memiliki peran penting dalam perkembangan pesantren. Segala hal yang bersangkutan dengan persoalan kepesantrenan diperbincangkan dalam forum dialog yang melibatkan seluruh elemen-elemen pesantren.

Setiap bulan, pesantren menyelenggarakan rapat yang melibatkan seluruh elemen yang ada di pesantren, mulai dari santri senior, pengurus pesantren, kepala lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi-organisasi yang ada di pesantren, hingga pengasuh pesantren (kiai). Biasanya, persoalan yang dibahas adalah mengenai perkembangan pesantren dan persoalan-persoalan yang terjadi selama satu bulan sebelumnya. Persoalan yang diangkat dalam rapat bulanan adalah persoalan yang benar-benar riil terjadi di pesantren. Dalam pertemuan tersebut, para pengurus melaporkan persoalan yang terjadi di pesantren menurut bidangnya masing-masing kepada kiai. Misalnya, pengurus pesantren bidang kepesantrenan bagian Keamanan dan Ketertiban akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Ba-

¹⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Jami' as-Sbagir*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 2, 494.

gian Ubudiyah akan melaporkan perkembangan kehidupan ibadah santri seperti shalat berjamaah, shalat tahajjud, dan seterusnya. Dengan laporan-laporan tersebut, pengasuh (kiai) akan mengetahui kondisi riil peristiwa-peristiwa yang terjadi di pesantren.

Dalam rapat tersebut, kepala kamar (santri senior) dan pengurus pesantren memiliki kesempatan untuk memberikan kritik, usul, dan saran. Setiap masukan tersebut tidak langsung ditanggapi oleh pengasuh, melainkan diberikan kepada pengurus yang berkaitan dengan persoalan yang diusulkan. Jika usulannya mengenai persoalan pendidikan pesantren, maka yang akan menanggapi urusan tersebut adalah pengurus pesantren bidang pendidikan. Pengasuh pesantren biasanya memberikan tanggapan, petunjuk, motivasi, dan saran di penghujung acara dan itu biasanya dibuat sebagai kesimpulan pada rapat tersebut. Terkadang, kiai juga memberikan kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, seperti larangan menggunakan handphone bagi para santri yang masih belum berkeluarga. Kebijakan tersebut dibicarakan bersama dengan para pengurus pesantren.

Rapat bulanan ini merupakan bentuk pengejawantahan musyawarah atau dialog yang khas pesantren Sukorejo. Para santri bisa dengan leluasa berdialog dengan pengasuh pesantren. Dalam rapat tersebut, tercermin kolektivitas pesantren Sukorejo dalam membahas persoalan-persoalan kepesantrenan. Kiai tetap dalam posisinya yang superior, akan tetapi tidak menafikan peran dan keterlibatan pengurus pesantren dan santri. Meskipun kiai memiliki kebijakan yang bersifat instruksional, tetap dibicarakan dengan para santri dan pengurus pesantren.

Memang, menurut Masdar Farid Mas'udi, Musyawarah, dilihat dari hasil daya ikatnya terbagi menjadi dua macam; *Pertama*, musyawarah yang hasilnya mengikat (*mulzimah*) atas para pihak yang terlibat, baik langsung dalam proses musyawarah sebagai peserta, maupun secara tidak langsung melalui perwakilannya. Musyawarah kategori ini adalah musyawarah untuk mengambil keputusan bersama di antara para pihak yang memiliki kedudukan sosial yang sama atau setar. *Kedua*, musyawarah yang dimaksudkan untuk mencari masukan/konsultasi dan atau sosialisasi suatu kebijakan dari seorang pemimpin dengan staf atau anak buahnya. Musyawarah ini hasilnya tidak bersifat mengikat, melainkan hanya bersifat informatif-konsultatif (*mu'linah*).

Seorang pemimpin yang bijaksana, meskipun berhak mengambil keputusan sendiri, tetap dianjurkan bermusyawarah konsultatif dengan staf atau para pembantunya.¹⁵

Pembicaraan mengenai perkembangan pesantren tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pesantren, melainkan juga melibatkan masyarakat luar pesantren, yaitu alumni pesantren, wali santri, dan simpatisan. Secara formal, alumni, wali santri, dan simpatisan berkumpul dalam pertemuan di setiap acara-acara besar yang diselenggarakan oleh pesantren, seperti haul *masyayikh*, Maulid Nabi, dan HUT pesantren (*imtihan*). Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kiai tidak hanya memberikan ceramah-ceramah atau wejangan-wejangan. Kiai secara terbuka juga memberikan ruang dialog dengan seluruh elemen yang terlibat dalam pertemuan tersebut. Seperti untuk memperbincangkan persoalan persiapan acara satu abad pesantren, kiai juga mendengarkan pendapat dari para alumni dan simpatisan. Wali santri juga memiliki ruang untuk menyampaikan uneg-unegnya. Bahkan dalam persoalan-persoalan kecil, seperti soal putranya tidak kerasan di pesantren, boros, dan seterusnya, kiai bersedia mendengarkannya untuk kemudian persoalan tersebut dibicarakan dengan pengurus pesantren.

Setiap hari, kiai juga menemui para tamu, wali santri, alumni dan lainnya yang sowan ke kediamannya. Dalam pertemuan informal tersebut, kiai tidak jarang melakukan dialog tentang persoalan-persoalan pesantren dan keadaan para alumni yang telah berkiprah di luar pesantren. Meskipun sudah keluar dari pesantren, kiai tetap memberikan pantauan dan pengawasan kepada para alumni.

Di samping itu, kiai juga terlibat melakukan dialog dengan masyarakat di sekitar pesantren. Lokasi pesantren Sukorejo berbaur dengan kompleks pemukiman masyarakat desa. Dengan letak geografis semacam ini, interaksi antara masyarakat pesantren dan masyarakat desa tidak bisa dielakkan. Terjadi hubungan timbal balik antara masyarakat pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. Untuk memenuhi kebutuhan pangan santri, masyarakat di sekitar pesantren menyediakan warung-warung nasi. Selain itu, jasa tranpor-

¹⁵ Masdar F, Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 58-59.

tasi becak juga menjadi transportasi yang disediakan oleh masyarakat bagi santri untuk berangkat dari asrama menuju sekolah atau ke tempat-tempat lain. Boleh dibilang, kehidupan ekonomi masyarakat pesantren sangat bergantung pada santri. Maka tak heran, jika saat para santri menikmati liburan di rumah masing-masing, warung-warung nasi di sekitar pesantren tutup dan order becak sepi.

Uniknya, harga sebungkus nasi dan tarif angkutan becak ditentukan bersama oleh pihak pesantren dan para pedagang nasi dan para abang becak. Jika ingin menaikkan harga atau tarif, maka harus ada pembicaraan terlebih dahulu bersama pihak pesantren agar pesantren bisa menyosialisasikan kepada para santri. Pernah suatu ketika, warung-warung nasi menaikkan harga nasi yang semula Rp. 2500 menjadi Rp. 3000 tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu bersama pihak pesantren karena sembako saat itu sedang naik. Kontan saja, keadaan tersebut memantik kontroversi di kalangan santri. Para santri kemudian mengadukan persoalan ini kepada pengurus pesantren, baik secara lisan melalui kepala kamar, atau melalui tulisan. Tulisan-tulisan para santri yang menginginkan agar harga nasi turun dimuat di majalah-majalah dinding yang ada di pesantren dan buletin lembaran yang merupakan hasil kreativitas kelompok santri. Kontroversi ini akhirnya sampai kepada pengasuh. Setelah itu, pihak pesantren melakukan dialog dengan para pedagang nasi. Keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut adalah pedagang nasi boleh dan berhak menaikkan harga nasi menjadi Rp. 3000 dengan tetap menerima santri yang membeli dengan harga Rp. 2500, tentu dengan pengurangan porsi.

Tradisi musyawarah juga terjadi di kalangan santri. Sejak awal memang santri dididik untuk bermusyawarah, terutama dalam pembelajaran kitab kuning dan bahtsul masa'il. Dalam ajang tersebut, santri bisa beradu argumen dengan santri lainnya bahkan beradu pendapat dengan kiai yang juga hadir dalam perhelatan tersebut. Tidak hanya dalam persoalan itu saja, dalam hal-hal tertentu, para santri juga melakukan dialog atau musyawarah.

Sebagaimana lazimnya pondok pesantren, pesantren Sukorejo terdiri dari asrama-asrama yang menampung para santri. Asrama-asrama tersebut diklasifikasi menjadi sembilan daerah dengan menggunakan nama-nama Walisongo. Setiap asrama pasti memiliki penanggung jawab asrama yang di-

istilahkan dengan kepala kamar. Di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat daerah pun demikian terdapat penanggung jawab daerah yang diistilahkan dengan kepala daerah. Setiap asrama atau daerah memiliki struktur organisasi masing-masing dengan tugas-tugas atau tanggung jawab yang jelas.

Posisi ketua kamar sangat strategis di pesantren Sukorejo. Sebagaimana dawuh KHR. Fawaid As'ad (alm.), ketua kamar secara kultural menempati kedudukan sebagai wakil pengasuh karena merekalah yang mengawasi dan melayani para santri secara langsung setiap waktu. Dari para kepala kamarlah pengasuh pesantren menanyakan kondisi kehidupan sehari-hari para santri.

Posisi kepala kamar biasanya diduduki oleh santri-santri senior. Mereka dipilih oleh para santri (anak kamar) lalu dilantik menjadi kepala kamar oleh pengurus pesantren sub bagian asrama. Para santri berpartisipasi untuk menentukan siapa penanggung jawab asrama mereka. Anak-anak kamar melakukan musyawarah terlebih dahulu siapa yang akan mereka jadikan pemimpin di asrama. Setelah ditentukan, kemudian ditavvarkan kepada yang bersangkutan untuk dimintai kesanggupannya memimpin kamar. Jika sepakat, maka yang bersangkutan diajukan kepada pengurus pesantren untuk dilantik menjadi kepala kamar.

Kebebasan Berpendapat di Sukorejo

Di pesantren Sukorejo, kebebasan berpendapat sangat dijunjung tinggi. Kebebasan berpendapat merupakan hak yang diberikan pesantren kepada para santri. Dalam buku pedoman pondok pesantren yang memuat anggaran rumah tangga, disebutkan dalam Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren pasal 5 tentang hak-hak santri pada poin (d) disebutkan, bahwa santri berhak menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, dengan berakhlaqul karimah. Pada poin (e) disebutkan, santri berhak memberikan pembelaan atas keputusan terhadap dirinya dengan cara yang baik dan sopan. Tidak hanya santri, hak kebebasan untuk mengajukan pendapat ini juga diberikan kepada pengurus. Disebutkan dalam pasal 13 poin (b), bahwa pengurus berhak menyampaikan saran kepada pengurus setingkat dan atau di atasnya dengan sebaik-baiknya.¹⁶

¹⁶ Buku Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Sumberejo Banyu-

Hak kebebasan berpendapat ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para santri. Tidak hanya secara lisan melalui rapat-rapat, melainkan juga dalam tulisan. Terbukti, banyak bertebaran buletin-buletin terbitan santri yang berada dalam organisasi tertentu atau lembaga tertentu di pesantren. Salah satu contohnya, santri Sukorejo yang berada di asrama ma'had aly, menerbitkan buletin *Tanwirul Afkar* setiap bulan yang pembacanya tidak hanya masyarakat pesantren, tetapi juga masyarakat di luar pesantren.¹⁷ Dalam buletin ini, para santri Ma'had Aly yang notabeneanya memang dipersiapkan sebagai kader ahli fiqh dan ushul fiqh, menerbitkan hasil-hasil kajian mereka yang seringkali menyulut kontroversi karena tema-tema yang diangkat menyangkut hal-hal yang 'tabu' dibicarakan di pesantren, seperti tulisan-tulisan yang bertemakan pluralisme¹⁸ atau kritik terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak *wong cilik*.¹⁹ Kontroversi pendapat santri ma'had aly bukan hanya dari sisi materi yang dibahas, tetapi juga dari sisi metodologi pembahasannya. Para santri ma'had aly tidak ragu menggunakan pisau analisis ushul fiqh secara langsung dengan tidak memberikan ruang superior bagi produk-produk fiqh dalam kitab-kitab kuning (*ketub at-turats*). Apa yang dilakukan oleh santri ma'had aly ini tentu sangat tabu bagi kalangan pesantren, terutama pesantren yang sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional. Namun demikian, pesantren Sukorejo tidak menghalangi para santri Ma'had Aly untuk terus melakukan kajian. Para dewan pengasuh pun memberikan dukungan kepada para santri untuk terus melakukan kajian.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Qadir 'Audah, kebebasan berpendapat (*hurriyyatul qaul*) adalah hak yang diberikan oleh islam kepada seluruh umat manusia. Bahkan, dalam hal tertentu, mengemukakan pendapat merupakan sebuah kewajiban apabila itu menyangkut kemaslahatan khlayak dan keteraturan sosial.²⁰ Pendapat ini terinspirasi dari firman Allah:

putih Situbondo Jawa Timur 2010-2015, 9.

¹⁷ Sebelum Ma'had Aly angkatan VIII (2012-2014), buletin tersebut diterbitkan setiap minggu berbentuk lembaran.

¹⁸ Mana buktinya..

¹⁹ Mana buktinya..

²⁰ Abdul Oadir Audah, *at-Tasyri' al-Jima'iy fi al-Islam* jilid 1(Beirut: Muassasah ar-Risalah), 33.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ditegaskan kemudian oleh Nabi dalam sabdanya,

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلمه وذلك
أضعف الإيمان

“Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu, maka dengan lisan, dan jika tidak mampu, maka dengan hati dan itu paling lemahnya iman,”²¹

Lebih lanjut, Abdul Qadir Audah menyatakan, bahwa kebebasan berpendapat — yang merupakan salah satu nilai inti dalam demokrasi — ini tidak bebas sebeb-bebasnya. Pendapat yang dikemukakan hendaknya tidak keluar dari koridor agama, etika sosial, dan tradisi masyarakat.²² Senada dengan pendapat tersebut, Syahrur, sebagaimana dikutip oleh Syafii Ma’arif, menyatakan bahwa kebebasan merupakan kehendak sadar untuk memilih atau meniadakan atau mengakui suatu eksistensi. Sedangkan demokrasi adalah praktik kebebasan yang dilakukan sekelompok manusia sesuai dengan otoritas pengetahuan, etika, estetika, dan adat istiadat.²³

Pesantren Sukorejo telan menunjukkan bahwa nilai-nilai kebebasan dalam demokrasi bisa bersatu dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi di pesantren. Hak kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi tetap memegang teguh spirit akhlaqul karimah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pesantren. Akhlaqul karimah merupakan landasan berdemokrasi di pesantren Sukorejo.

²¹ Abu Husain Muslim an-Naisaburi, *Shahih Muslim* jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), 50.

²² Abdul Oadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'iy fi al-Islam* jilid 1, 33.

²³ A. Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), 159.

Banyak hal yang dapat menjadi faktor kebebasan berpendapat di pesantren Sukorejo. Persentuhan pesantren dengan perguruan tinggi merupakan salah satu faktor pemicu utamanya. Di pesantren Sukorejo, berdiri perguruan tinggi Institut Agama Islam Ibrahimy. Santri Sukorejo sebagian berstatus sebagai mahasiswa dan tentu bersentuhan dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan. Di samping itu, santri yang berstatus mahasiswa ini berbaur dengan santri lainnya yang tidak berstatus mahasiswa. Dalam satu asrama, latar belakang pendidikan santri bisa beragam. Santri yang bukan mahasiswa secara langsung bisa melihat bagaimana mahasiswa melakukan aktifitas kemahasiswaannya.

Di samping itu, organisasi-organisasi santri tumbuh pesat di pesantren Sukorejo. Pesantren Sukorejo memiliki organisasi induk yang mewadahi seluruh santri dan alumni, yaitu Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafiiyah (IKSASS). Organisasi ini bertujuan untuk menjadi wahana melatih santri dan alumni untuk berorganisasi.²⁴ Organisasi ini menaungi rayon-rayon yang dibagi menurut daerah asal santri, baik dalam skala kabupaten, kota, kepulauan, bahkan provinsi. Dari organisasi inilah, santri bisa belajar bagaimana berdemokrasi.

Persentuhan pesantren dengan dunia luar tak kurang mempengaruhi kebebasan berpendapat di pesantren. Pesantren Sukorejo tidak bersikap *a priori* dengan dunia luar pesantren. Pesantren Sukorejo sering mengadakan seminar-seminar yang mendatangkan narasumber dari luar pesantren.

Penutup

Nilai-nilai demokrasi tumbuh subur di pesantren Sukorejo. Kolektifitas, keterbukaan, kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan nilai-nilai demokrasi menemukan di pesantren yang telah memasuki usia satu abad ini. Nilai-nilai demokrasi yang berlangsung di pesantren Sukorejo sejatinya adalah pengejawantahan dari nilai-nilai musyawarah yang diajarkan oleh Islam.

Di pesantren Sukorejo, kiai tidak sendiri menyelesaikan masalah. Kha-

²⁴ Panduan Dasar Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, 22.

risma yang dimiliki tidak menghalangi pemimpin pesantren tersebut untuk melakukan dialog dengan para santri, pengurus pesantren, wali santri, alumni, dan simpatisan pondok pesantren. Persoalan-persoalan yang terjadi di pesantren diselesaikan secara kolektif. Meskipun kiai pada akhirnya memiliki kebijakan yang mengikat, tetapi proses dialog tidak diabaikan. Proses dialog tersebut juga terjadi di kalangan santri.

Di samping itu, Pesantren Sukorejo sangat menghargai kebebasan berpendapat. Pesantren memberikan hak kepada santri untuk mengajukan pendapat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur akhlaqul karimah. Akhlaqul karimah ini menjadi landasan etis santri dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk dalam hal berdemokrasi.

Hal-hal yang menjadi faktor lestarnya nilai-nilai demokrasi di pesantren Sukorejo dapat ditengarai karena terjadi persentuhan antara pesantren dan perguruan tinggi. Sebagian santri di Sukorejo juga berstatus mahasiswa. Pergulatan pemikiran tradisional dan modern benar-benar terjadi. Apalagi, secara geografis santri yang tidak berstatus mahasiswa tidak dipisah dengan santri lainnya. Di samping itu, banyak media bagi para santri untuk mengemukakan pendapat, seperti organisasi-organisasi dan media cetak yang diterbitkan oleh santri.

Jadi terlalu berlebihan kalau kemudian khalayak ramai terutama para ilmuwan menyimpulkan bahwa demokrasi itu hanya ada di Amerika, dan sekaligus yang dapat dijadikan sandaran untuk praktik berdemokrasi. Pemikiran yang demikian merupakan bias kolonial yang perlu secara perlawanan didekonstruksi. Pondok pesantren ternyata memiliki konsep-konsep demokrasi dan praktik demokrasi yang bersandar padanya yang *genuine* bukan jiplakan dari Amerika Serikat.

Daftar Pustaka

- al-Baghdadi, Mahmud al-Alusi, *Rub al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran wa as-Sab'i al-Matsani* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001)
- al-Buthy, Ramadhan, Sa'id, *Fiqh as-Sirah an-Nabawiyah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991)
- Audah, Oadir, Abdul, *at-Tasyri' al-Jina'iy fi al-Islam* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tt.)

- Buku Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur 2010-2015
- Dhafier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3S, 2001)
- Farchan, Hamdan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*, (Yogyakarta: Pilar Religia, 2005)
- Maarif, Syafi'i, A, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009)
- Maarif, Syafii, A, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009)
- Mas'udi, F, Masdar, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011),
- an-Naisaburi, Muslim, Abu Husain *Shahib Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Panduan Dasar Santri Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo
- al-Qurthuby, Muhammad bin Ahmad al-Anshary *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- ar-Razi, Muhammad, *Tafsir Mafatih al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, cet. 2, 2007)
- Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren* (Jakarta: LP3S, 1999)
- as-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Jami' as-Saghir* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Wahid, Abdurrahman *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001).

